

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Djatmiati, Tatiek Sri *et.al*, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 2012.
- Effendi, H. A. Masyhur, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993.
- Hadjon, Philipus M., *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dalam Buku Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintah yang Layak*, Citra Aditya Abadi, Bandung. 1996.
- , *Tentang Wewenang*, Yuridika, Surabaya, 1990.
- , *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesia Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia “*Online Single Submission*”, *Panduan Penggunaan Registrasi OSS version 1.00 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2011.
- , Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum : Edisi Revisi*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2017.
- Mertokusumo, Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta, Liberty, 1984.
- Spelt, Mr. N. M. *et al*, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, 1991.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Syarif, Laode M. ed, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, USAID.

Skripsi/Disertasi :

Djatmiati, *Prinsip Izin Industri di Indonesia*, **Disertasi**, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.

Khoiro, Amalia, *Kartu Izin Tinggal Sebagai Sarana Pengendalian Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia*, **Skripsi**, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.

Pidato Pengukuhan Guru Besar :

Djatmiati, *Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis dalam Pelayanan Publik*, **Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar** dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya Tanggal 24 November 2007.

Jurnal :

Holle, Erick, 'Pelayanan Publik Melalui Electronic Government : Upaya meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatkan *Public Service*', Jurnal Sasi, Vol.17, No.3, Juli-September 2011.

Ma'um, Mohammad, Teori Interpretasi Hukum (Upaya Mencari Prinsip Keadilan dan Maksud Hukum), *el-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 1, No 2, 2015.

Pudjiastuti, Lilik, *et.al*, Jurnal Implementation Problems Of Licensing Of Integrated Business Electronically (*Online Single Submission*) In Indonesia, 2019.

Internet:

Aditya, Arya, "Sistem Perizinan Online Tunggal, Jokowi : Kita Paksa", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418171510-4-11538/sistem-perizinan-online-tunggal-jokowi-kita-paksa>, 18 April 2018, dikunjungi pada tanggal 18 September 2018.

<http://oss.go.id> dikunjungi pada tanggal 18 September 2018.

<http://p2t.jatimprov.go.id> dikunjungi pada tanggal 26 Juni 2019.

Pambudhy, Agung, “Kemudahan Usaha RI Kalah dari Vietnam Hingga Singapura”, <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4283004/kemudahan-usaha-ri-kalah-dari-vietnam-hingga-singapura>, 1 November 2018, dikunjungi pada tanggal 21 Januari 2019.

Wirayani, Prima, “Ease of Doing Business RI Turun, Ini Penjelasan Bank Dunia”, 31 Oktober 2018, <http://www.cnbcindonesia.com/news/20181031201049-4-40020/ease-of-doing-business-ri-turun-ini-penjelasan-bank-dunia> dikunjungi pada tanggal 20 April 2018.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).